

**IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK
AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TERHADAP PELARANGAN
PENJUALAN TANAH ADAT KELUAR DESA ADAT TISTA (STUDI
KASUS DESA ADAT TISTA, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN
KARANGASEM)**

Oleh

I Kadek Abdi Ramanda Putra, NIM. 2114101201

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah supaya (1) mengidentifikasi Implementasi pasal 26 ayat 1 Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Terhadap Penjualan Tanah Adat Keluar Desa Adat Tista serta (2) mengkaji akibat hukum terhadap penjualan tanah keluar desa di Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan fokus pada metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumen, observasi dan wawancara dengan informan. Teknik penentuan sampel menggunakan non probability sampling dengan metode purposive sampling. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) tanah di Desa Adat Tista tidak boleh di perjual belikan ke luar atau tidak boleh di miliki oleh orang luar selain orang yang berdomisili dari Desa Adat Tista. Desa Adat Tista yang memiliki lima jenis tanah: Ayahan Desa, Desa Laba Pura, Perekrek, Bukti Menjadi Sedan dan tanah desa tanpa ayah ayah. Namun ada beberapa pengecualian untuk jual-beli tanah di desa adat tista yaitu di mana penjual dan pembeli wajib mendapat izin dari Desa Adat dengan menyampaikan alasan transaksi yang harus sesuai dengan Awig-Awig.; dan (2) bahwasannya apabila terjadinya penjualan tanah keluar Desa Adat Tista maka si pembeli harus siap menerima sanksi yang telah di atur dalam awig-awig Desa Adat Tista. Aturan ini telah ditetapkan dalam awig-awig (peraturan adat) sejak lama dan tetap berlaku hingga saat ini. Pembatasan penjualan tanah kepada pihak luar merupakan upaya pengendalian oleh pakelih desa yang melakukan seleksi ketat untuk memastikan transaksi tanah memberi manfaat bagi kedua belah pihak dan sesuai dengan kepentingan desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kodifikasi awig-awig yang mengatur tentang penjualan tanah secara lebih sistematis dan transparan serta mengembangkan mekanisme mediasi yang efektif untuk mengatasi potensi sengketa tanah.

Kata Kunci: UUPA, Jual beli tanah, Tanah adat, Desa Adat

**AGRARIAN LAW NUMBER 5 YEAR 1960 REGARDING THE
PROHIBITION OF LAND SALES OUTSIDE TRADITIONAL OF TISTA
TRADITIONAL VILLAGE (CASE STUDY OF TISTA TRADITIONAL
VILLAGE, ABANG DISTRICT, KARANGASEM REGENCY)**

By

I Kadek Abdi Ramanda Putra, NIM. 2114101201

Legal Studies Program

ABSTRACT

The purpose of this study is to (1) identify the Implementation of article 26 paragraph 1 of the Agrarian Basic Law No. 5 of 1960 on the Sale of Land Out of the Tista Traditional Village and (2) to review the legal consequences of the sale of land out of the village in Adat Tista Village, Abang District, Karangasem Regency. This research uses an empirical law approach with a focus on descriptive methods. Data is collected through document study techniques, observations and interviews with informants. Sample determination technique using non probability sampling with purposive sampling method. All collected data is then processed using a qualitative approach. The research results state that (1) land in Adat Tista Village must not be sold outside or must not be owned by outsiders other than people domiciled from Adat Tista Village. Tista Traditional Village which has five types of land: Ayahan Desa, Laba Pura Village, Perekrek, Bukti Menjadi Sedan and village land without ayah ayah. However, there are some exceptions for buying and selling land in the traditional village of Tista, namely where the seller and buyer must obtain permission from the Traditional Village by conveying the reason for the transaction that must be in accordance with the Awig-Awig.; and (2) that if there is a sale of land outside the Tista Traditional Village, the buyer must be ready to accept the sanctions that have been set in the Awig-awig of the Tista Traditional Village. This rule has been set in awig-awig (customary regulations) for a long time and is still valid to this day. Restriction on the sale of land to outside parties is an effort to control by the village guard who conducts strict selection to ensure that the land transaction benefits both parties and is in accordance with the interests of the village. This research recommends the need for codification of awigs that regulate land sales more systematically and transparently and develop effective mediation mechanisms to overcome potential land disputes.

Keywords: *UUPA, Land sale and purchase, Customary land, Customary village*